

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
LEMBAR TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Metode Penelitian.....	18

G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TEORI UMUM	22
A. Teori Negara Hukum.....	22
1. Pengertian Teori Negara Hukum	22
2. Ciri-ciri Negara Hukum	26
B. Teori Pluralisme Hukum	28
1. Pengertian Teori Pluralisme Hukum	28
2. Teori-teori yang Menganalisis Tentang Pluralisme Hukum	30
C. Teori Kewarganegaraan	36
1. Pengertian Warga Negara	36
2. Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi	39
3. Asas-asas Kewarganegaraan	41
D. Asas-asas Hukum Umum	44
1. Pengertian Asas Hukum	44
2. Asas-Asas Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan.....	45
BAB III TEORI KHUSUS.....	47
A. Teori Legislasi.....	47
1. Pengertian Teori Legislasi.....	47

2. Teori-teori yang Menganalisis Tentang Legislasi.....	48
3. Asas-asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	53
4. Hierarki Perundang-undangan di Indonesia.....	57
B. Teori Hak Atas Tanah	58
1. Ruang Lingkup Hak Atas Tanah.....	58
2. Ketentuan Umum Hak Milik.....	60
3. Pengertian Hak Milik	61
4. Subjek Hak Milik	62
5. Terjadinya Hak Milik.....	63
6. Peralihan Hak Milik	65
7. Hapusnya Hak Milik	67
C. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perspektif Yuridis.....	68
1. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam UUD 1945	68
2. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam UUD 1945 Pasca Amandemen...	70
3. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.....	72
4. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	75

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 79

A.	Dasar Hukum Aturan Mengenai Pertanahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	79
B.	Analisa Berlakunya Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 Ditinjau dari :	88
1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.....	94
2.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial	98
3.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.. ..	103
4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	107
5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	110
6.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.....	112

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi	115
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	119
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN	